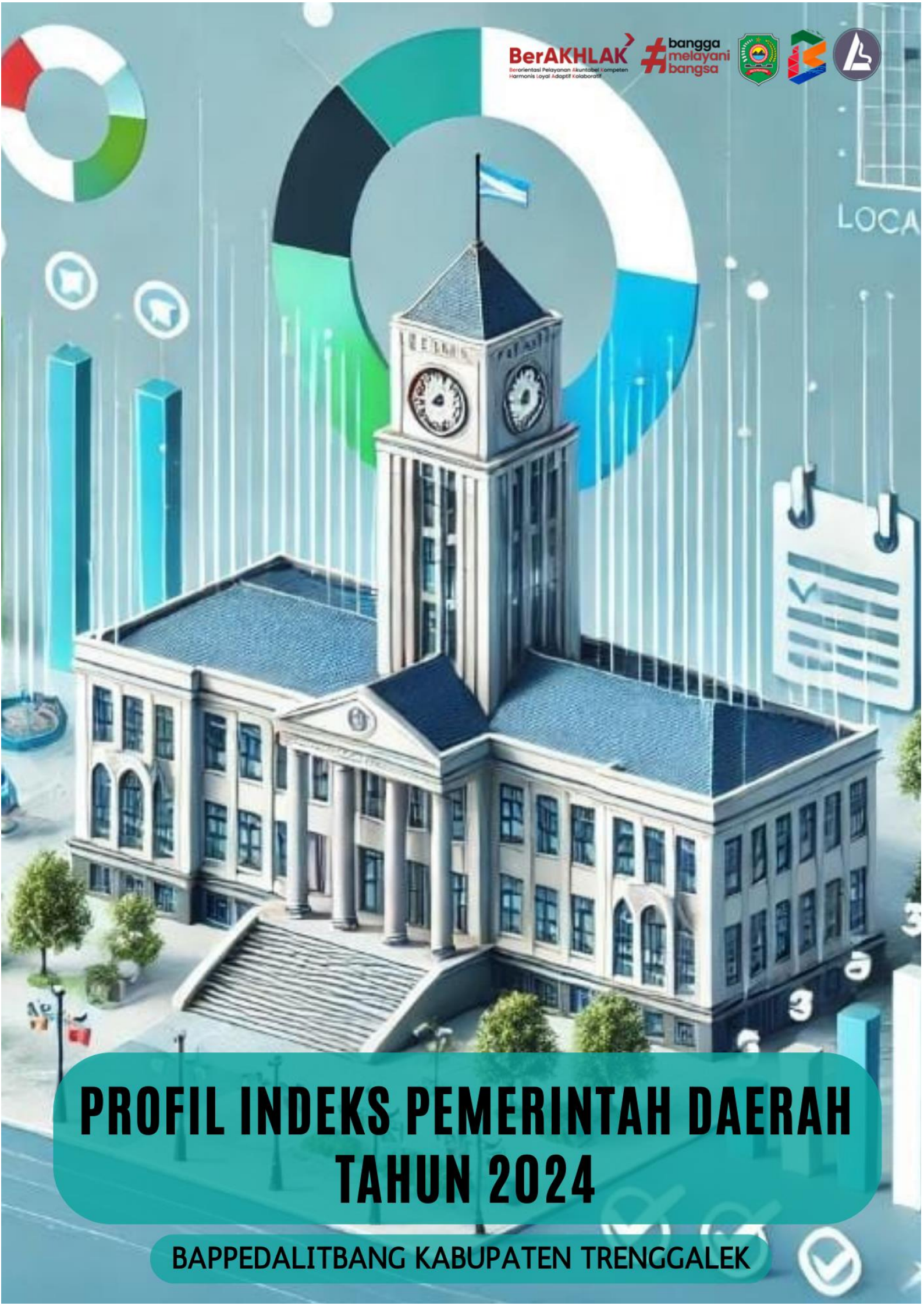

PROFIL INDEKS PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK

PROFIL INDEKS PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 :

INDEKS DAYA SAING DAERAH

Diterbitkan oleh:

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Pembina:

dr. Ratna Sulistyowati, M.Kes

Teguh Purianto S.Si

Zakie Ichwani, S.Hut

Atik Sulasmi ST

Harendhika Lukiswara ST, M.AP

Ririn Fitriani SE, M.AP

Perumus:

Alqoma Subkhi, SE

Ulya Awwalul Mar'ah, S.AP

Anindita Diesti Sabdorahso, S.Si.

Kontributor:

Bidang Litbang Rendalevpor

Cover by : Canva

Cetakan:

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen "Profil Indeks Pemerintah Daerah Tahun 2024" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2024. Indeks Pemerintah Daerah merupakan alat ukur penting dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Melalui profil ini, diharapkan dapat memberikan informasi akurat dan relevan bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat luas, dalam memahami capaian dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berupa data, analisis, dan masukan yang berharga. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Trenggalek, Desember 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670331 199603 2 003

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2
2.2 Indeks Lainnya (IPKD dan IKK)	8
2.2.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	8
2.2.2 Indeks Kualitas Kebijakan Daerah (IKK)	10
BAB III PENUTUP	13
3.1 Kesimpulan dan Saran	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan IPKD Kab Trenggalek Tahun 2018-2023	9
Tabel 2	Kerangka Pengukuran IDSD	3
Tabel 3	Skala penilaian hasil pengukuran IKK	12
Tabel 4	Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Target IDSD Trenggalek Tahun 2025-2045	7
Gambar 2	Framework Instrumen IKK	10
Gambar 3	Variabel Pengukuran IKK	10
Gambar 4	Bisnis Proses Self Assessment Pengukuran IKK	11
Gambar 5	Bisnis Proses Tindak Lanjut Self Assessment Pengukuran IKK	12

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Skor IDSD Kabupaten Trenggalek tahun 2022-2023	3
Grafik 2	Posisi IDSD Kabupaten Trenggalek, Nasiona dan Jawa Timur	4
Grafik 3	skor IDSD Prov. Jatim dan Kab. Trenggalek	5
Grafik 4	Skor IDSD Tahun 2023 Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan	6
Grafik 5	Perkembangan IPKD Kab Trenggalek Tahun 2018-2023	9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi wilayahnya secara mandiri. Namun, pengelolaan yang efektif membutuhkan alat ukur yang dapat mengevaluasi kinerja daerah secara objektif dan komprehensif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui pengembangan berbagai indeks, seperti indeks daya saing daerah, indeks pengelolaan keuangan daerah, dan indeks kualitas kebijakan.

Indeks daya saing daerah menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, inovasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, indeks pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan publik secara transparan, akuntabel, dan efisien. Di sisi lain, indeks kualitas kebijakan mengukur bagaimana kebijakan yang dihasilkan mampu merespons kebutuhan masyarakat, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.

Penyusunan dokumen profil indeks pemerintah daerah bertujuan untuk menyediakan informasi yang mendalam dan terstruktur mengenai kinerja pemerintah daerah berdasarkan berbagai aspek tersebut. Dengan adanya dokumen ini, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daerah, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk memacu kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan mengacu pada hasil analisis berbagai indeks, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Profil Inovasi Daerah ini adalah sebagai berikut:

a. Menyajikan informasi komprehensif mengenai gambaran umum, capaian, tantangan dan peluang inovasi daerah di Kabupaten Trenggalek.
b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan inovasi di Kabupaten Trenggalek
c. Menginventarisasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan

Adapun tujuan penyusunan Profil Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pemerintah daerah berdasarkan berbagai indeks yang relevan.
b. Membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan strategis yang berbasis data dan bukti.
c. Mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, perumusan kebijakan, dan daya saing wilayah.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD 2023 diharapkan menjadi data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan berbasis bukti terkait daya saing daerah di Indonesia.

Tujuan IDSD :

- Menggambarkan kondisi daya saing daerah dan faktor-faktor pendorong produktivitas yang membentuk daya saing suatu daerah.
- Hasil IDSD dapat dibandingkan dalam tataran Nasional dan Internasional
- Memberikan data dan informasi untuk rujukan dalam perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan daya saing daerah.

Manfaat IDSD :

- BRIN dapat meningkatkan pemantauan dan pembinaan kepada BRIDA.
- Pemerintah Daerah dapat meningkatkan daya saing daerahnya
- BRIDA dapat meningkatkan kualitas rumusan rekomendasi kepada Pemda
- Dunia Usaha dapat meningkatkan strategi investasi dan pengembangan usahanya.

Pengukuran IDSD mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing dengan 48 indikator untuk kabupaten / kota. Keseluruhan indicator diukur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 20 kementerian dan Lembaga. Berikut perbedaan pengukuran IDSD dibanding tahun sebelumnya :

Tabel 1 perbedaan pengukuran IDSD dibanding tahun sebelumnya

Aspek	IDSD 2017-2021	IDSD 2022-2023
Kebutuhan Data	Data Primer	**Data Sekunder**
Metode Pengumpulan Data	Survei/Kuesioner	Data dikumpulkan dari K/L dan Institusi resmi di pusat
Keterlibatan Pemda	Terlibat Aktif Pengisian Kuesioner	**Tidak ada**
Verifikasi / Validasi Data	Tim IDSD Pusat	K/L Produsen data
Perspektif	Pemerintah Daerah	**Entitas Bisnis**
Data Cleaning	Tidak ada	**Ada**
Coverage	Tidak Menyeluruh	**Menyeluruh**

Sumber : BRIN

Kerangka Pengukuran IDSD adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Kerangka Pengukuran IDSD

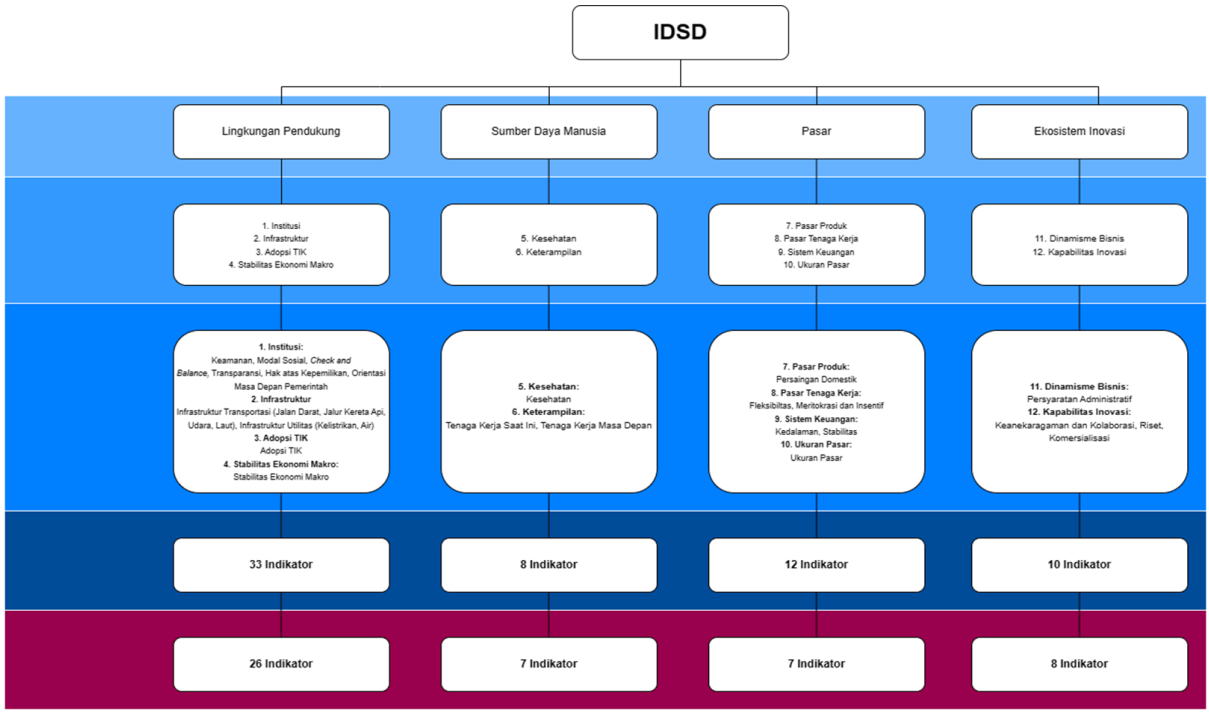

Sumber : BRIN

IDSD merupakan indeks komposit, kewenangan dan Walidata yang beragam, Metode Normalisasi Min-Max -> Relativitas skor/nilai dari indikator & pilar seluruh populasi/daerah yang diukur, tidak untuk pemeringkatan atau pengkategorian suatu daerah, dan bukan untuk ditingkatkan secara parsial melainkan harus dilihat holistik.

Perkembangan skor IDSD Kab. Trenggalek adalah sebagai berikut, tahun 2020 sebesar 3,2741, Tahun 2021 sebesar 3,12, tahun 2022 sebesar 2,84 dan tahun 2023 menjadi 3,13. Terkait penurunan Skor IDSD dari tahun 2020 dikarenakan terjadi Perubahan Metode Pengukuran IDSD (semula melalui Pelaporan, berganti menjadi pengukuran Global Competitiveness Index dari WEF).

Grafik 1 Skor IDSD Kabupaten Trenggalek tahun 2022-2023

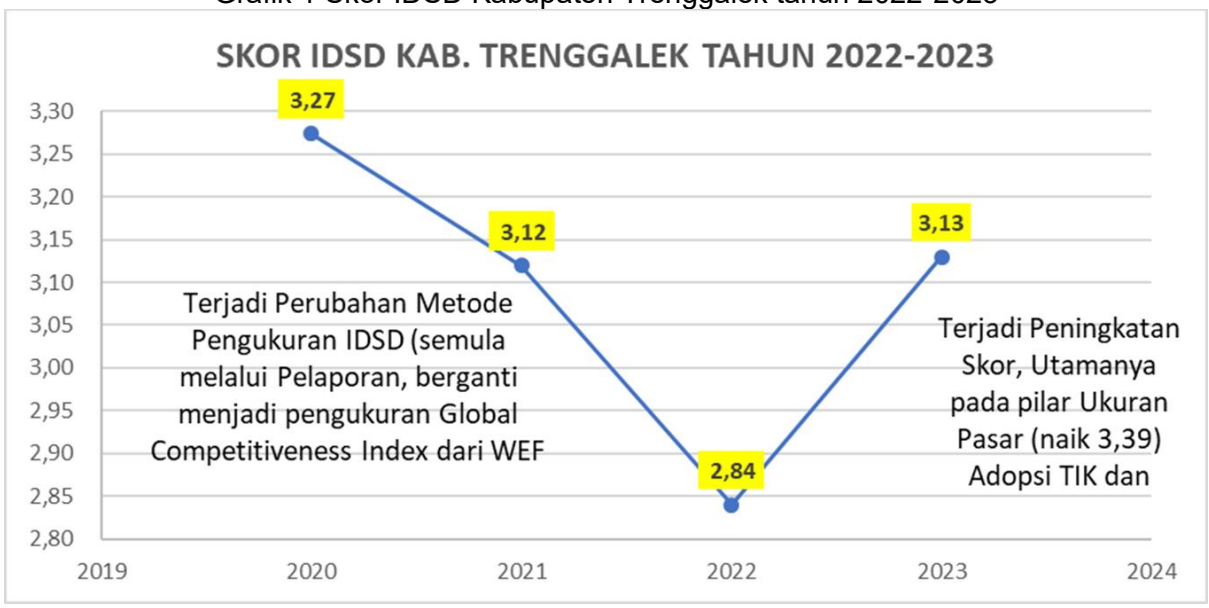

Posisi daya saing Kabupaten Trenggalek Meningkat dari Tahun 2022, namun masih berada dibawah nasional dan provinsi. Secara umum posisi kab. Trenggalek mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, semula ada di peringkat 202 menjadi peringkat 188 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia dan semula di peringkat 27 menjadi peringkat 26 dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

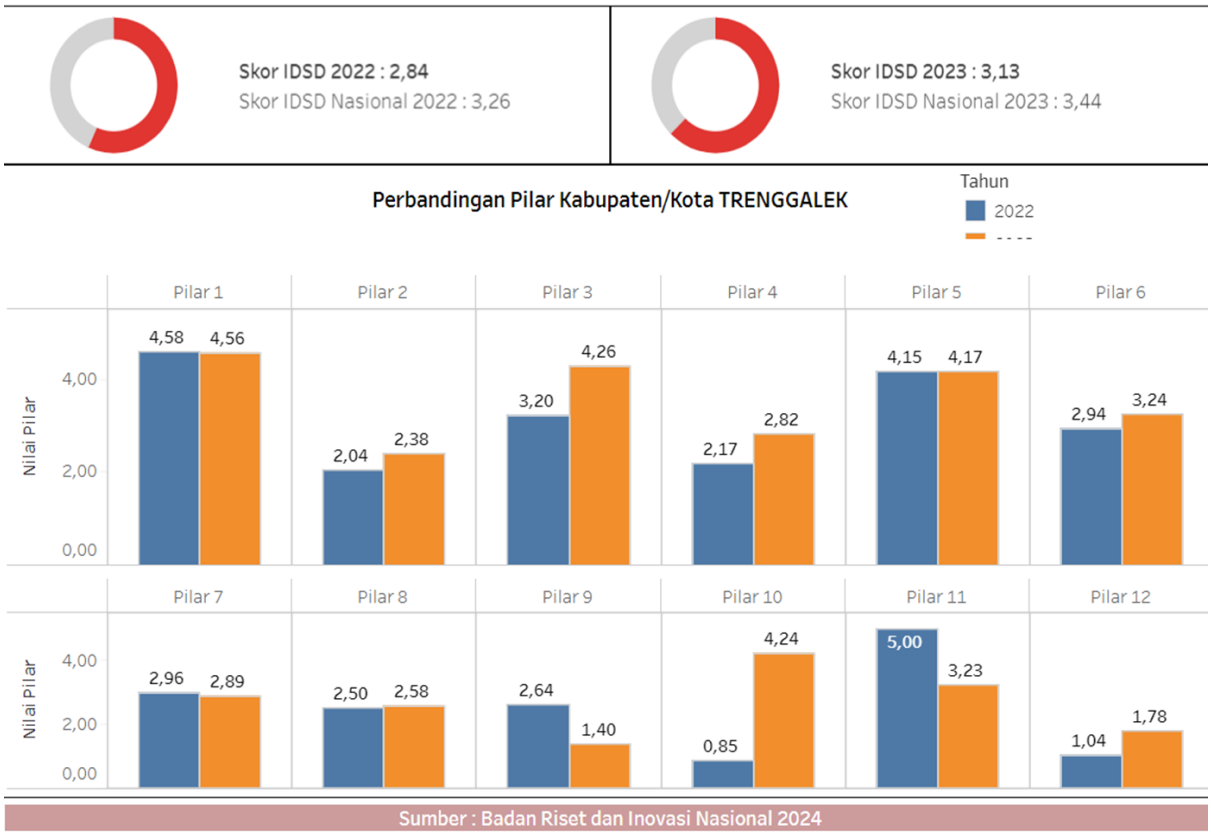

Peningkatan skor IDSD didominasi oleh beberapa pilar, Utamanya pada pilar Ukuran Pasar (naik 3,39 poin) Adopsi TIK (naik 1,056 poin) dan Kapabilitas Inovasi (naik 0,84 poin).

Grafik 2 Posisi IDSD Kabupaten Trenggalek, Nasiona dan Jawa Timur

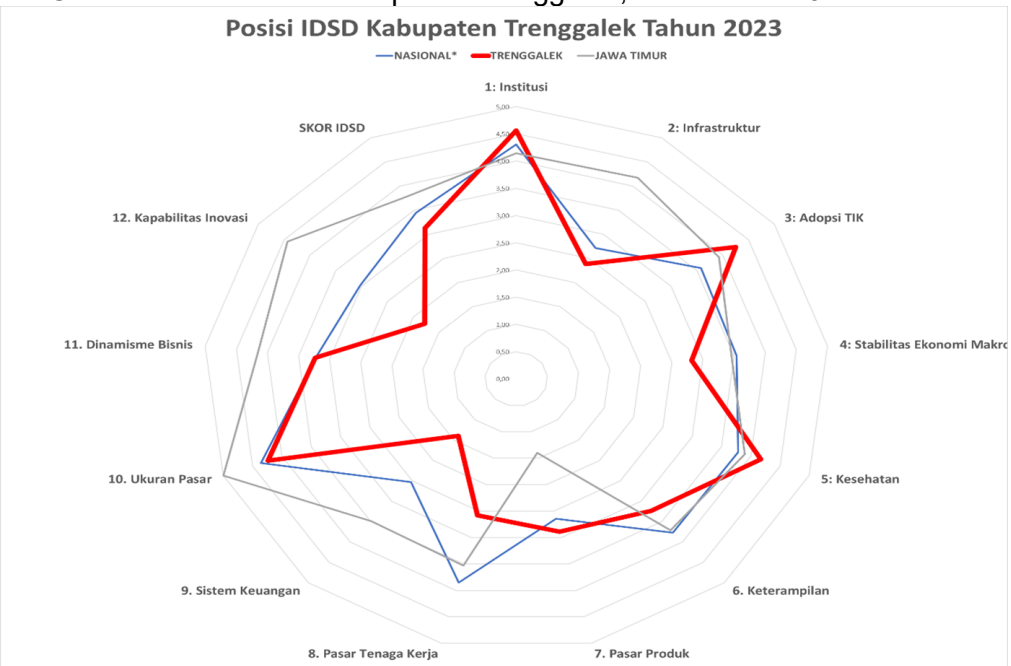

Terdapat 4 Indikator dari 48 indikator yang sudah memiliki skor maksimal. 2 indikator dirasa sulit untuk dimaksimalkan yaitu Layanan Infrastruktur Stasiun Kereta Api dan Bandara. 10 besar indicator yang harus segera diperbaiki adalah :

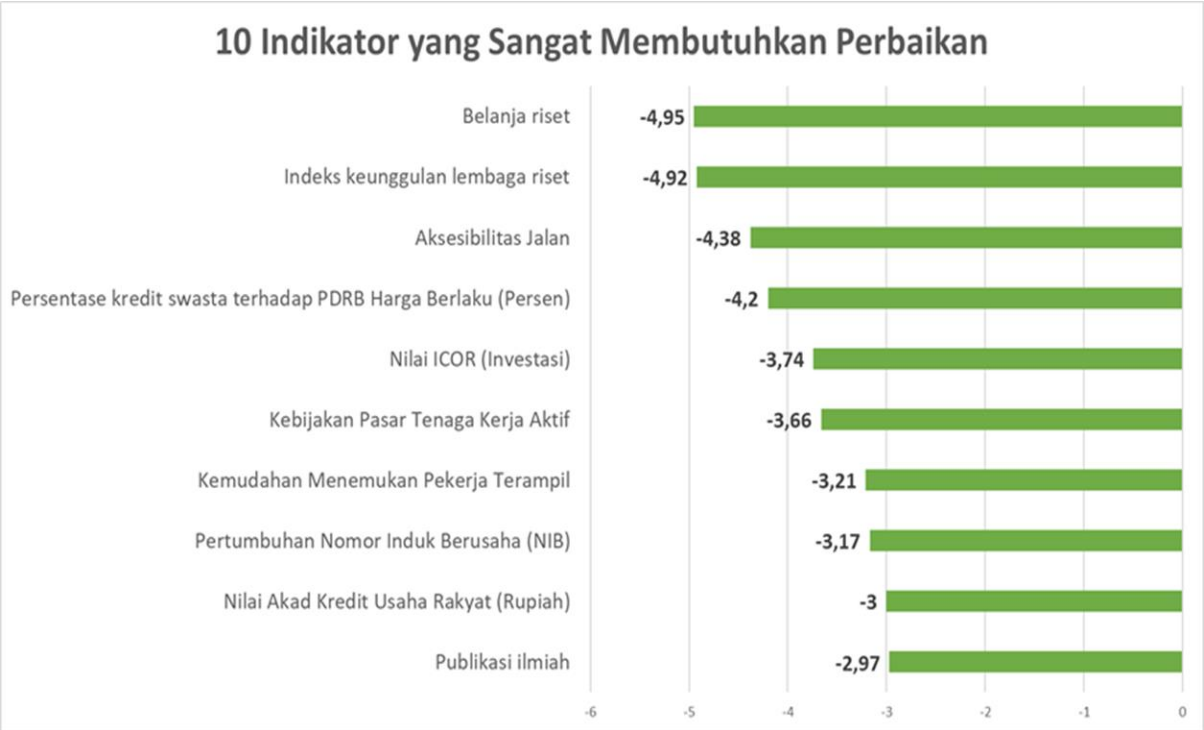

- Kabupaten Trenggalek memiliki skor IDSD 3,13; di bawah skor Provinsi 3,78.
- Pilar yang memiliki skor di atas provinsi: pilar 1 Institusi; pilar 3 Adopsi TIK; pilar 5 Kesehatan; pilar 7 Pasar Produk;
- Pilar yang skornya dibawah nasional: pilar 2 Infrastruktur; Pilar 4 Stabilitas ekonomi makro; pilar 6 Keterampilan; pilar 8 Pasar Tenaga Kerja; pilar 9 Sistem Keuangan; pilar 10 Ukuran Pasar; pilar 11 Dinamisme Bisnis; pilar 12 Kapabilitas Inovasi

Grafik 3 skor IDSD Prov. Jatim dan Kab. Trenggalek

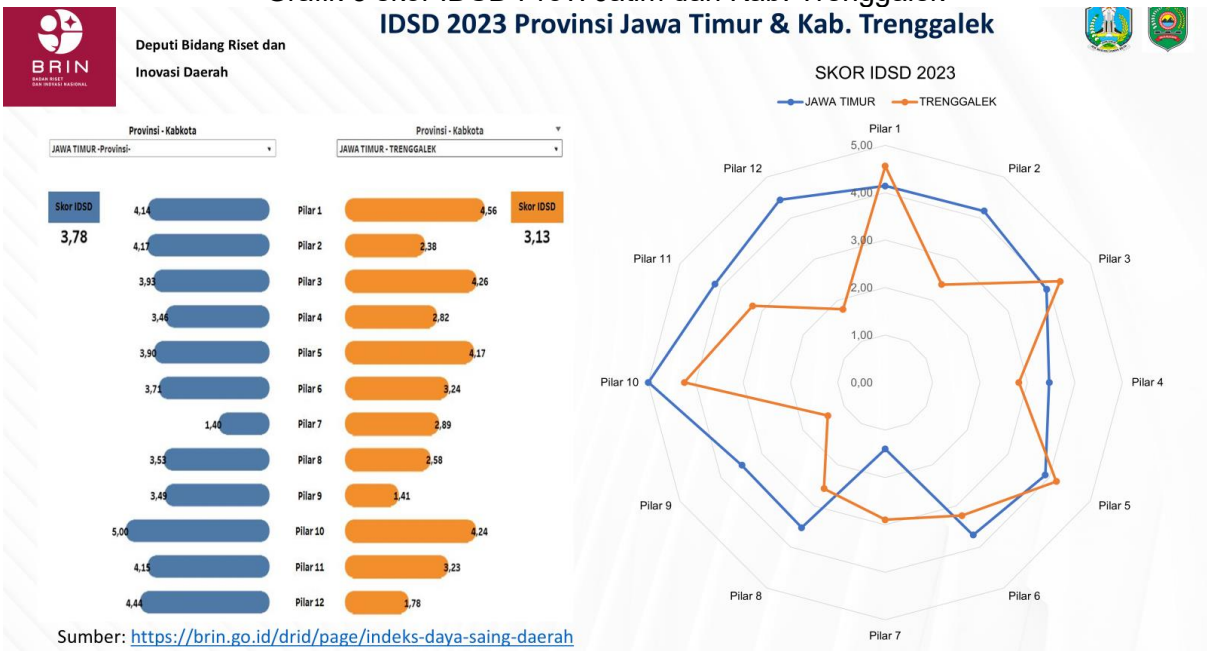

Sumber: https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah

Grafik 4 Skor IDSD Tahun 2023 Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan

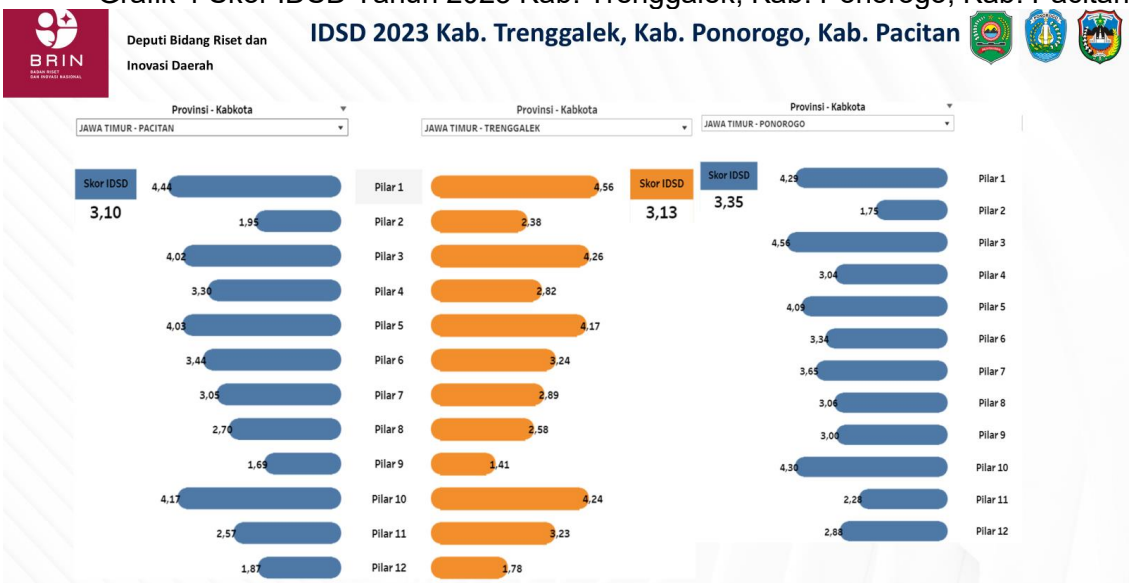

Sumber: https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah

- Kabupaten Trenggalek memiliki skor IDSD 3,13 yang lebih tinggi dari Kabupaten Pacitan 3,10. tetapi lebih rendah daripada Kabupaten Ponorogo yang memiliki skor 3,35
- Pilar Kab. Trenggalek yang memiliki skor jauh lebih tinggi daripada Kedua Kabupaten lainnya: pilar 1 Institusi, pilar 2 Infrastruktur, pilar 5 Kesehatan dan pilar 11 Dinamisme Bisnis
- Pilar yang skornya dibawah skor kedua Kabupaten lainnya: pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, pilar 6 Keterampilan, pilar 7 Pasar Produk, pilar 8 Pasar Tenaga Kerja, pilar 9 Sistem Keuangan, dan pilar 12 Kapabilitas Inovasi

IDSD sebagai salah satu indikator RPJPN 2025-2045. sehingga perumus melakukan skenario pentargetan capaian IDSD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

Gambar 1 Target IDSD Trenggalek Tahun 2025-2045

TARGET IDSD TRENGGALEK TH 2025 - 2045

Pemerintah Trenggalek berusaha meningkatkan 3 pilar yang lemah dan dikombinasikan dengan arah kebijakan Visi 2025 -2045 :

1. Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi (Naik 1,54)
2. Indeks Pilar Dinamisme Bisnis (Naik 1,19)
3. Indeks Pasar Tenaga Kerja (Naik 1,13)

Dengan indikator kunci :

1. Tingkat pengelolaan lingkungan
2. Aksesibilitas Jalan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai ICOR (Investasi)
5. Rata-rata tahun sekolah
6. Keterampilan lulusan
7. Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil
8. Angka Harapan Sekolah
9. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif
10. Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB)
11. Publikasi ilmiah
12. Belanja riset Indeks
13. keunggulan lembaga riset

Tahun	Target Bawah	Target Atas	Target Jatim
2025 -2029	3,15	3,19	3,80
2030-2034	3,20	3,44	3,88
2035-2039	3,25	3,58	3,94
2040-2045	3,30	3,75	4,00

PILAR IDSD	2025	2045	SELISIH
Pilar 1 : Institusi	4,59	4,95	0,36
Pilar 2: Infrastruktur	2,46	3,26	0,80
Pilar 3: Adopsi TIK	4,30	4,66	0,35
Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	2,93	3,97	1,04
Pilar 5: Kesehatan	4,19	4,39	0,20
Pilar 6: Keterampilan	3,34	4,33	0,98
Pilar 7: Pasar Produk	2,97	3,77	0,80
Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	2,70	3,83	1,13
Pilar 9: Sistem Keuangan	1,49	2,29	0,80
Pilar 10: Ukuran Pasar	4,28	4,68	0,40
Pilar 11: Dinamisme Bisnis	3,34	4,52	1,19
Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	1,91	3,45	1,54

Adapun strategi peningkatan IDSD 2022-2023 diantaranya menyelaraskan kebijakan Daerah dengan Pusat, kebijakan harus berdasarkan Bukti/Data yang relevan, benchmarking dan best practice dengan daerah yang memiliki skor lebih tinggi seperti Kabupaten Sleman dan Buleleng, dan menyusun kajian kebijakan dan program dengan memanfaatkan kekuatan.

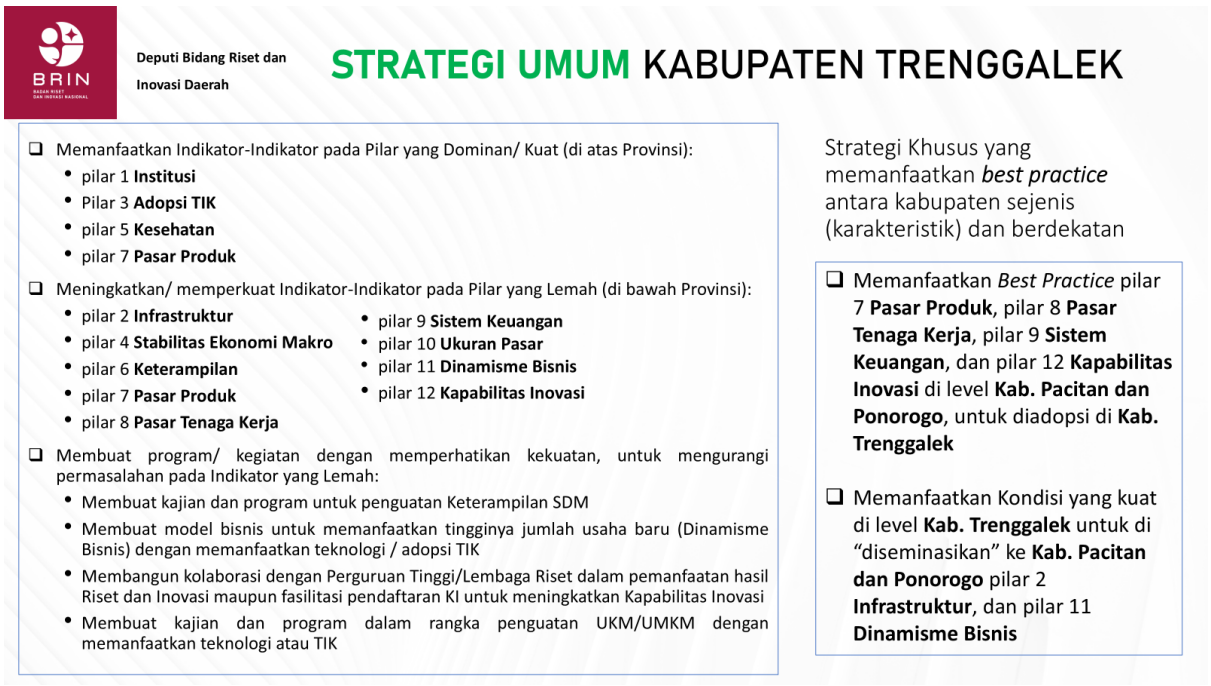

2.2 Indeks Lainnya (IPKD dan IKK)

2.2.1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

IPKD Merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

IPKD memiliki tujuan yaitu mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu; Memacu dan memotivasi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah; Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota; Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secaraa nasional; Meningkatkan peran Aparat Pengawas internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Pengukuran IPKD ada 6 dimensi diantaranya adalah :

- Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan inidkator :
  a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD
  b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS
  c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD
  d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS
  e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD
- Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dengan indikator :
  a. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%
  b. Penyediaan alokasi anggaran belanja urusan kesehatan sebesar 10%
  c. Penyediaan alokasi anggaran belanja infrastruktur sebesar 25% sekarang 40%
  d. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan indikator :
  a. Ketepatan waktu
  b. Keteraksesan
- Penyerapan anggaran dengan indikator :
  a. anggaran belanja operasional
  b. anggaran belanja modal
  c. anggaran belanja tidak terduga
  d. anggaran belanja transfer
     (sesudah PP 12 Tahun 2019)
- Kondisi keuangan Daerah;
  a. kemandirian keuangan
  b. fleksibilitas keuangan
  c. solvabilitas operasional
  d. solvabilitas jangka pendek
  e. solvabilitas jangka panjang
  f. solvabilitas layanan
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan indikator Opini selama BPK 3 (tiga atas) tahun LKPD dilakukan terakhir berturut berdasarkan -turut opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit.

IPKD Kabupaten Trenggalek menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan nilai IPKD, predikat yang diperoleh masih dalam kategori **"Perlu Perbaikan dengan nilai B"**. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kategori yang lebih baik. Dimana pada pada tahun ini dimensi 1 memiliki nilai 11,037 poin, dimensi 2 memiliki nilai 20 poin, dimensi 3 memiliki nilai 11,121 poin, dimensi 4 memiliki nilai 15 poin, dimensi 5 memiliki nilai 2,841 poin dan dimensi 6 memiliki nilai 15 poin.

Grafik 5
Perkembangan IPKD Kab Trenggalek Tahun 2018-2023

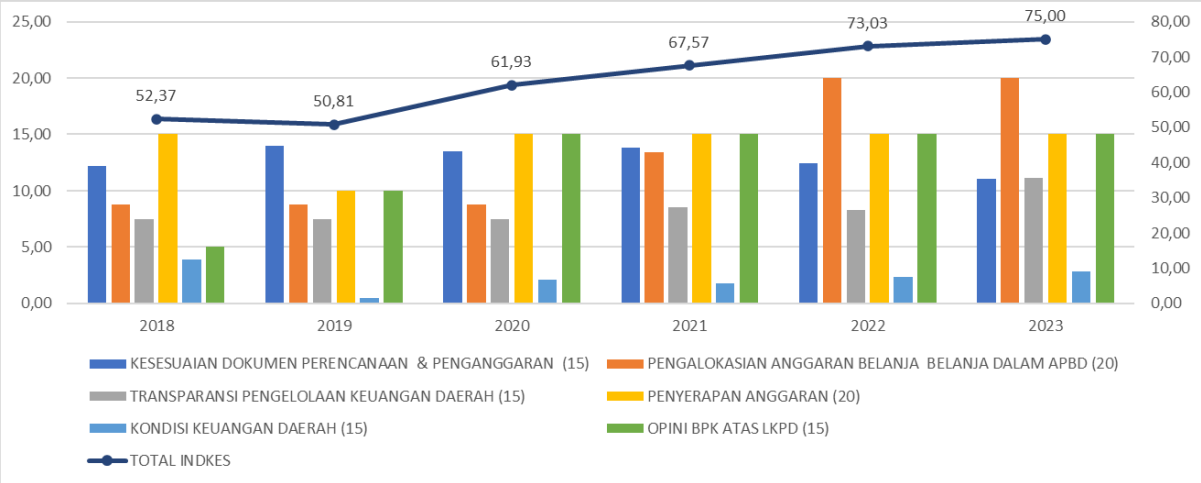

Sumber : https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/

Tabel 1 Perkembangan IPKD Kab Trenggalek Tahun 2018-2023

NO.	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
D,1,	Kesesuaian Dokumen Perencanaan & Penganggaran (15)	12,21	14,00	13,51	13,80	12,40	11,04
D,2,	Pengalokasian Anggaran Belanja Belanja Dalam APBD (20)	8,79	8,79	8,79	13,45	20,00	20,00
D,3,	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15)	7,50	7,50	7,50	8,53	8,28	11,12
D,4,	Penyerapan Anggaran (20)	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
D,5,	Kondisi Keuangan Daerah (15)	3,86	0,52	2,13	1,79	2,36	2,84
D,6,	Opini BPK Atas LKPD(15)	5,01	10,01	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total Indeks	52,37	50,81	61,93	67,57	73,03	75,00

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa :

- Indikator Pengalokasian Anggaran Belanja-Belanja Dalam APBD dan Opini BPK Atas LKPD sudah mendapatkan skor maksimal sehingga perlu dipertahankan.
- Indikator transparansi pengelolaan keuangan, Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran serta penyerapan anggaran sifatnya perlu perbaikan secara bertahap
- Indikator kondisi keuangan daerah perlu dilakukan perbaikan signifikan karena masih mendapatkan skor 2,84 dari skor maksimal 15.

2.2.2 Indeks Kualitas Kebijakan Daerah (IKK)

IKK sebagai instrumen untuk mengukur kualitas proses yang semestinya dilalui dalam setiap penyusunan kebijakan, mulai dari tahap agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi dapat diungkapkan dalam Gambar sebagai berikut:

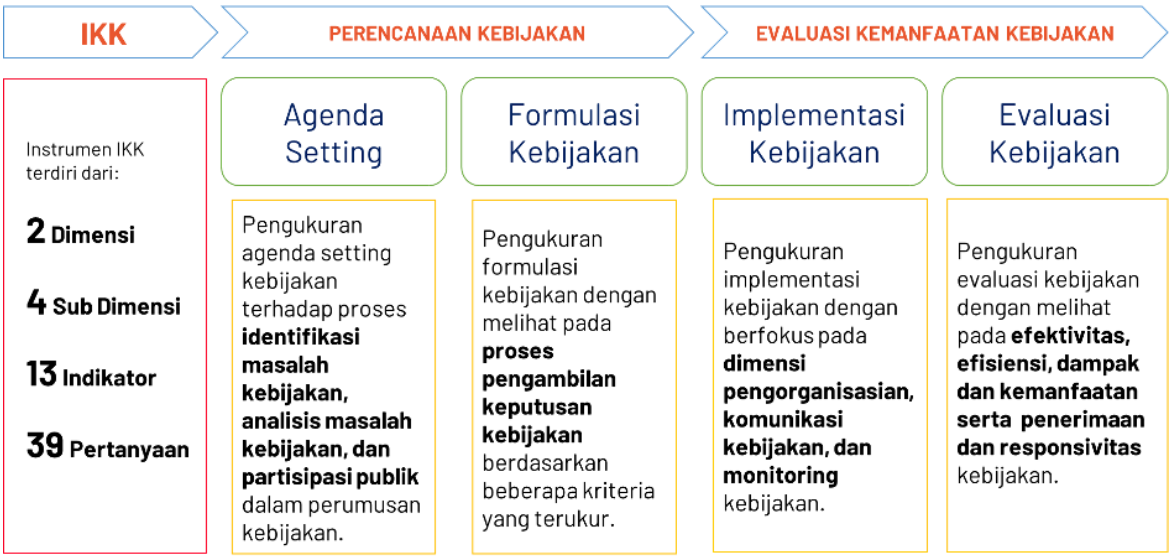

Gambar 2 Framework Instrumen IKK

Secara lebih detail, variabel-variabel yang digunakan dalam IKK digambarkan dalam Gambar berikut ini:

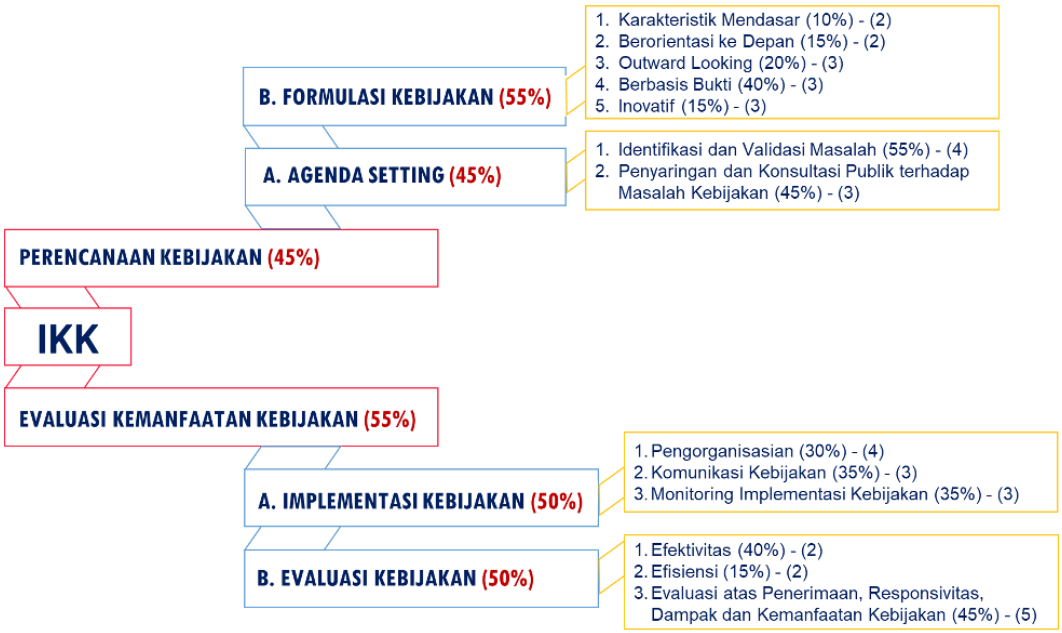

Gambar 3 Variabel Pengukuran IKK

Pelayanan pengukuran IKK dilakukan melalui serangkai bisnis proses yang melibatkan seluruh stakeholder pengukuran IKK yang terdiri dari Admin Nasional Sistem Informasi IKK, Koordinator Utama, Koordinator Instansi, Admin Instansi, dan Enumerator Kebijakan yang semuanya telah diaktivasi akun penggunanya dalam Sistem Informasi IKK. Ada pun gambaran bisnis proses pelayanan pengukuran IKK secara keseluruhan digambarkan dalam gambar alur di bawah ini:

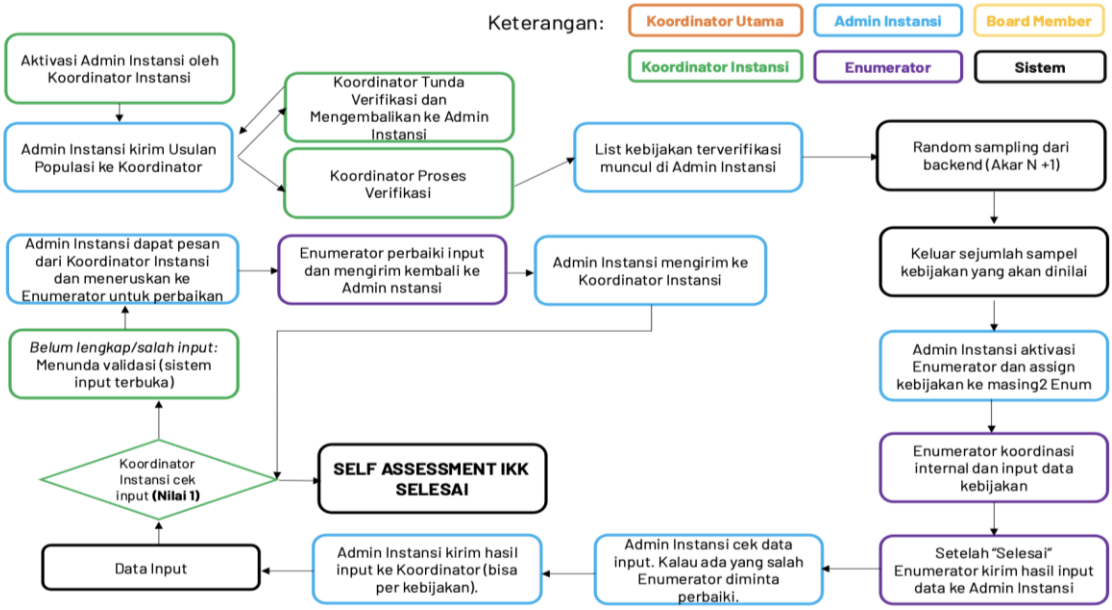

Gambar 4 Bisnis Proses Self Assessment Pengukuran IKK

Setelah bisnis proses self assessment selesai selanjutnya dilaksanakan validasi penilaian IKK. Secara lebih teknis, alur proses pelaksanaan tindak lanjut self assessment pengukuran IKK dapat digambarkan sebagai berikut:

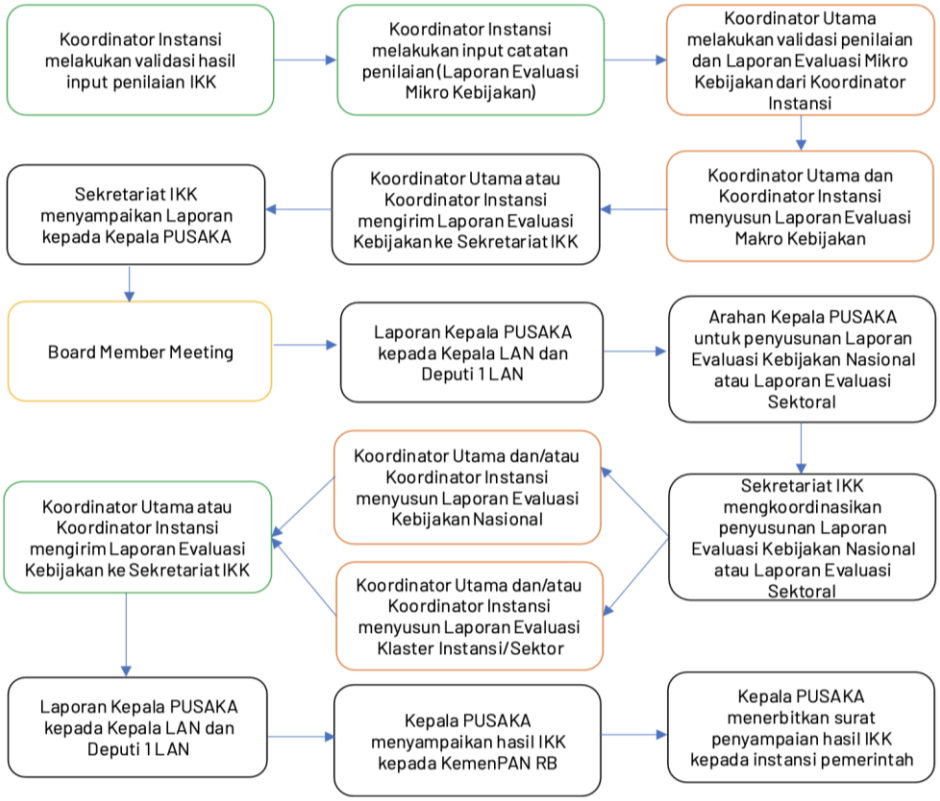

Gambar 5 Bisnis Proses Tindak Lanjut Self Assessment Pengukuran IKK

Pengukuran IKK secara nasional dilaksanakan 2 tahun sekali. Penilaian IKK tahun 2021 merupakan kegiatan penilaian yang pertama kali dilakukan secara nasional dan terkorelasi dengan pengukuran pencapaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengukuran IKK Tahun 2021 menghasilkan baseline awal dalam capaian target IKK secara nasional. Adapun skala penilaian dan predikat penilaian yang digunakan dalam pengukuran IKK mengacu pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 3 Skala penilaian hasil pengukuran IKK

Nilai	Predikat Penilaian
91,00 - 100,00	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

Tabel 4 Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024

Tahun	IKK	Predikat Penilaian
2021	38,19	Kurang
2023	10,00	Kurang
2024	10,00	Kurang

Perlu perbaikan secara menyeluruh, untuk saat ini koordinator pengukuran IKK adalah Bagian Hukum Setda Kab. Trenggalek

Informasi IKK : https://ikk.lan.go.id/tentang
Pedoman IKK : https://ikk.lan.go.id/panduanikk.pdf

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan dan Saran

1. Posisi daya saing Kabupaten Trenggalek tahun 2023 Meningkat dari Tahun 2022, namun masih berada dibawah nasional dan provinsi. Kabupaten Trenggalek memiliki skor IDSD 3,13. Peningkatan skor IDSD didominasi oleh beberapa pilar, Utamanya pada pilar Ukuran Pasar (naik 3,39 poin) Adopsi TIK (naik 1,056 poin) dan Kapabilitas Inovasi (naik 0,84 poin). Terdapat 4 Indikator dari 48 indikator yang sudah memiliki skor maksimal. 2 indikator dirasa sulit untuk dimaksimalkan yaitu Layanan Infrastruktur Stasiun Kereta Api dan Bandara. 10 besar indicator yang harus segera diperbaiki.
2. IDSD sebagai salah satu indikator RPJPN 2025-2045. Target capaian IDSD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 adalah 3,15-3,75
3. Strategi peningkatan IDSD diantaranya menyelaraskan kebijakan Daerah dengan Pusat, kebijakan harus berdasarkan Bukti/Data yang relevan, benchmarking dan best practice dengan daerah yang memiliki skor lebih tinggi seperti Kabupaten Sleman dan Buleleng, dan menyusun kajian kebijakan dan program dengan memanfaatkan kekuatan.
4. IPKD Kabupaten Trenggalek masih dalam kategori "Perlu Perbaikan dengan nilai B". Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kategori yang lebih baik. Indikator kondisi keuangan daerah perlu dilakukan perbaikan signifikan karena masih mendapatkan skor 2,84 dari skor maksimal 15.
5. Perkembangan Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 dengan skor 38,19 (kurang) tahun 2023 dengan skor 10,00 (kurang), dan tahun 2024 dengan skor 10,00 (kurang), Perlu perbaikan secara menyeluruh, untuk saat ini koordinator pengukuran IKK adalah Bagian Hukum Setda Kab. Trenggalek. Pedoman perbaikan dapat mengacu https://ikk.lan.go.id/panduanikk.pdf